

## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan lokasi penelitian dengan dibagi ke dalam dua pembahasan yaitu desa Jurug dan program Kampung KB. Pembahasan pertama yaitu mengenai desa Jurug yaitu dari segi letak geografis, kondisi lingkungan, luas dan sebaran penggunaan lahan, kondisi social, penduduk Desa Jurug, kondisi ekonomi, dan visi misi desa Jurug. Kedua membahas tentang gambaran program kampung KB.

#### A. Desa Jurug

##### 1. Letak Geografis Desa Jurug

Letak geografis Desa Jurug berada pada ketinggian +450 m s/d 650 m di atas permukaan air laut, dengan batas – batas sebagai berikut (Pemerintah Desa Jurug, 2018):

- a. Bagian Utara : Desa Bedrug, Kecamatan Pulung & Desa Bareng, Kecamatan Pudak
- b. Bagian Selatan : Desa Bedoho, Kec. Sooko
- c. Bagian Barat : Desa Sooko, Kec. Sooko
- d. Bagian Timur : Desa Banjarejo, Kec. Pudak dan Desa Boto Putih Dompnyong, Kec. Bendungan, Kab. Trenggalek

Tabel 1.3

#### Pembagian Wilayah Desa Jurug

NO.	DUSUN	DUKUH	RW	RT
-----	-------	-------	----	----

1.	Dusun I	Slembi Pulerejo	RW 1 RW 2 RW 3	RT 1 RT 2 RT 3 RT 4 RT 5 RT 6 RT 7 RT 8 RT 9
2.	Dusun II	Lawang Semaran Sukorejo Margopurno Jelek	RW 4 RW 5	RT 1 RT 2 RT 3 RT 4 RT 5 RT 6 RT 7 RT 8 RT 9 RT 10 RT 11
3.	Dusun III	Karang Anyar Karang Lor	RW 6	RT 1 RT 2 RT 3 RT 4
4.	Dusun IV	Karang Kidul Jurug Turus	RW 7 RW 8 RW 9	RT 1 RT 2 RT 3 RT 4 RT 5 RT 6 RT 8

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Jurug, diambil (2018).

## 2. Kondisi Lingkungan

Desa Jurug adalah desa yang terletak di daerah dataran rendah. Mayoritas wilayah Desa Jurug yaitu lahan pertanian sehingga cocok bila ditanami berbagai tanaman pangan, misalnya padi, jagung, dan sayuran, dan tembakau. Tanaman palawija juga bisa tumbuh subur di wilayah Desa Jurug. (Pemerintah Desa Jurug, 2017)

### 3. Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan

Desa Jurug memiliki luas lahan 240,304 hektare. Pada umumnya, seluruh lahan di Desa Jurug difungsikan secara produktif. Ini menunjukkan Bahwasannya Desa Jurug mempunyai sumber daya alam yang bagus dan siap untuk diolah dan dikembangkan. Potensi sumber daya alam ini selain untuk produktif pertanian juga rencana kedepan sebagai pengembangan daerah wisata, misalnya di kawasan Sendang Songo dan sekitarnya. (Pemerintah Desa Jurug, 2017)

Tabel 1.4

Luas Lahan Berdasarkan Jenis Penggunaan Di Desa Jurug Tahun 2016

Tanah Sawah			Tanah Kering				
Teknis	1/2 Teknis	Tadah Hujan	Pekarangan Pemukiman	Hutan Rakyat	Tegal Ladang	Hutan Negara	Lain- lainnya
150.8640Ha-		2.1190 Ha	81.7660 Ha	-	2.1000 Ha-		5.250Ha

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Jurug, diambil (2018).

#### 4. Kondisi Sosial

Kehidupan sosial yang berkembang di Desa Jurug adalah masyarakat pedesaan. Dalam struktur ini, nilai budaya dan tradisi masih dijunjung tinggi. Sifat gotong royong dan kesetiakawanan sosial sangat kental. Kesetiaan serta loyalitas pada tokoh pemuka masyarakat dalam komunitasnya tumbuh baik. Jiwa dan semangat tersebut sangat penting sebagai modal utama dalam rangka menyukseskan rencana program pembangunan. (Pemerintah Desa Jurug, 2017)

#### 5. Jumlah Penduduk Desa Jurug:

Adapun jumlah penduduk serta kepala keluarga desa Jurug pada tahun 2012 sampai tahun 2016 yaitu tercatat sebanyak 5552 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 2225 orang

Tabel 1.5

Jumlah angka Penduduk dan Kepala Keluarga Desa Jurug Tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		Perempuan	Laki – laki	Jumlah	
1	2012	2235	2358	4593	1794
2	2013	2282	2471	4753	1875
3	2014	2359	2586	4945	1994

4	2015	2462	2665	5127	2145
5	2016	2576	2776	5552	2225

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Jurug, diambil 2018.

#### **a. Jumlah Penduduk Berdasar Usia**

Adapun jumlah penduduk berdasarkan kategori usia pada tahun 2016 yaitu tercatat sebanyak 0-15 tahun sebanyak 1.578 jiwa, usia 16-65 sebanyak 3.309 jiwa dan usia 66-ke atas sebanyak 465 jiwa (Dokumen Pemerintah Desa Jurug, diambil 2018.).

### **6. Kondisi Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Desa Jurug menunjukkan kecenderungan naik. Adanya program-program pemerintah yang langsung menyentuh pada masyarakat kecil mampu mendorong menurunkan angka kemiskinan. Adapun jenis mata pencaharian masyarakat desa Jurug yaitu terdiri atas PNS sebanyak 68 jiwa, swasta 725 jiwa, pedagang 175 jiwa, petani 832 jiwa, tukang 118 jiwa, buruh tani 615 jiwa, peternak 832 jiwa; dan jasa sebanyak 17 jiwa (Pemerintah Desa Jurug, 2018)

### **7. Visi Dan Misi Desa Jurug**

#### **a. Visi**

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah Desa masa yang akan datang. Visi adalah alat bagi

Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya memantau, mengevaluasi atau memberi predikat terhadap kondisi keadaan Desa yang diinginkan. Visi dari Desa Jurug itu sendiri adalah sebagai berikut (Dokumen Pemerintah Desa Jurug, diambil 2018):

- 1) Bersih
- 2) Endah
- 3) Rapi
- 4) Ekosistem
- 5) Tertata
- 6) Inovatif
- 7) Kekayaan
- 8) Aman
- 9) Damai

Misi merupakan suatu pernyataan yang memberi ketetapan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi itulah yang tentu harus dipegang oleh pemerintah desa . Dengan tujuan untuk mewujudkan visi desa jurug tersebut, maka dari itulah Pemerintah Desa Jurug menetapkan tiga Misi sebagai berikut (Dokumen Pemerintah Desa Jurug, diambil 2018):

- 1) Misi Bidang Pelayanan
- 2) Misi Bidang Pemberdayaan
- 3) Misi Bidang Pembangunan

(Dokumen Pemerintah Desa Jurug, Diambil 2018)

## **B. Profil Kampung KB di Desa Jurug**

### **1. Gambaran Umum Kampung KB**

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau dusun yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis (Inventarisasi data kampung KB, 2016-2018). Kampung KB dicanangkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo di kabupaten Cirebon Jawa Barat pada tanggal 14 Januari 2016. Kampung KB bukan hanya melibatkan Dinas KB saja, namun juga melibatkan seluruh Dinas intansi terkait untuk bersama-sama meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama masyarakat yang berada di daerah-daerah pinggiran, perbatasan, terpencil dan wilayah nelayan. (Petunjuk Teknis Kampung KB, 2015)

Kampung KB dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 52 tahun 2009 mengenai masalah Perkembangan Kependudukan serta Pembangunan Keluarga yang sebagai dasar atas pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak hanyafokus pada masalah Pengendalian Penduduk, namun juga pada masalah Pembangunan Keluarga yang tentu harus mendapatkan perhatian. Oleh

karena itulah maka dalam rangka penguatan implementasi KKBPk pada tahun 2015-2019, Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) diharapkan dapat menyusun satu kegiatan yang diharapkan mampu memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung dapat bersentuhan dan memberi manfaat kepada masyarakat.

Oleh karena itulah maka untuk menjawab tantangan itu digagaslah Implementasi Kampung KB melalui wadah Kampung KB ini yang kedepannya diharapkan pelaksanaan KKBPk dan program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara bersamaan. Dalam hal ini sesuai dengan amanat yang sudah tertuang dalam agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke-tiga yaitu “ Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Maka dari itu cukuplah beralasan jika pembangunan kependudukan dimulai dari berbagai wilayah di daerah pinggiran yaitu kampung, dikarenakan kampung adalah cikal bakal terbentuknya desa. Apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka di desa juga akan maju, apabila seluruh desa maju maka sudah pasti negara juga akan menjadi maju. ( Petunjuk Teknis Kampung KB, 2015)

Kampung KB itu sendiri sangat diharapkan menjadi sebuah miniatur maupun gambaran dari suatu desa yang didalamnya ada keterpaduan dari implementasi kebijakan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang diharmoniskan dengan implementasi kebijakan pembangunan dari berbagai sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik maupun secara sistematis. Sesuai dengan beberapa definisi Kampung KB itu sendiri yaitu meliputi ”satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program

KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis “. Pada intinya Kampung KB itu sebenarnya telah didesain untuk upaya membumihkan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPK yang gunanya untuk mendekatkan akses pelayanan Kampung KB kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya untuk memberikan capaian serta menerapkan delapan fungsi keluarga yang secara utuh dalam masyarakat.

Dengan begitu maka dalam kegiatanyang dilakukan oleh Kampung KB tidak selalu identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi saja, tetapi juga merupakan sebuah implementasi kebijakan pembangunanterpadu dan terintegrasi dengan berbagai implementasi pembangunan lainnya, sehingga wadah dari Kampung KB ini mampu kita jadikan sebagai wahana dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam implementasi kebijakan yang mengarah pada upaya merubah sikap, tingkah laku dan juga cara berfikir (*mindset*) masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kampung yang pada awal mulanya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan beberapa kampung lainnya, masyarakat yang awalnya tidak mempunyai kegiatan dapat bergabung dengan kelompok kegiatan yang ada, dan keluarga yang tadinya tidak memiliki usaha dapat bergabung menjadi anggota UPPKS yang ada. (Petunjuk Teknis Kampung KB, 2015 : 3)

Ruang lingkup pelaksanaan kampung KB, antara lain Kependudukan, Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga, serta kegiatan lintas sektor, yaitu bidang pemukiman, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kampung KB dirancang pula sebagai upaya pendekatan akses pelayanan Kampung KB pada keluarga kecil yang beradakampung dalam memberikan kepastian delapan fungsi keluarga. Kampung KB dibangun berada di tingkat RW maupun di tingkat dusun dengan menggunakan pendekatan budaya masing-masing daerah.

Adanya Kebijakan kampung KB ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Kampung KB bertujuan untuk : mengentaskan kemiskinan, terbinaanya peserta KB aktif, mengaplikasikan 8 fungsi keluarga, dan koordinasi lintas sektor. (Petunjuk Teknis Kampung KB, 2015 : 4)

Selain itu, kampung KB juga meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam program KKBPK, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, meningkatkan ketahanan keluarga melalui penerapan program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia, meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung serta meningkatkan taraf kehidupan dan kualitas masyarakat pada wilayah kampung KB melalui berbagai kegiatan lintas sektor lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. (Petunjuk Teknis Kampung KB, 2015 : 4)

Secara spesifik, pembentukan kampung KB yaitu dilatarbelakangi oleh:

- a. Kebijakan Keluarga Berencana sudah tidak lagi populer dan terdengar gaungnya seperti di era Orde Baru,
- b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa ataupun yang setara melalui program KKBPK ditambah pembangunan sektor yang terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.
- c. penguatan KKBPK yang dikelola dan juga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat,
- d. Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita, terutama pada agenda prioritas ke tiga yaitu “ Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu " Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia ",
- e. mengangkat dan menggairahkan kembali kebijakan KB untuk persiapan tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi tahun 2010 – 2030mendatang (Petunjuk Teknis Kampung KB,2015).

## **2. Syarat-syarat Pembentukan Kampung KB**

Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu (Inventarisasi data kampung KB : 2016-2018 : 08): Pertama, tersedianya data kependudukan yang akurat. Kedua, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat.

## **3. Kriteria Wilayah Kampung KB**

Dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yaitu:

(Inventarisasi data kampung KB : 2016-2018 : 08)

a. Kriteria utama : yang mencakup dua hal:

- 1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada;
- 2) jumlah peserta yang mengikuti KB masih berada di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa atau kelurahan di mana kampung KB tersebut berlokasi.

b. Berikut ini adalah daftar kriteria wilayah yang mencakup 10 kategori (dipilih salah satu) :

1. Pemukiman yang kumuh
2. Daerah pesisir
3. Daerah Aliran Sungai (DAS),
4. Bantaran rel Kereta Api
5. Kawasan miskin (termasuk Miskin Perkotaan),
6. Daerah terpencil
7. Area perbatasan
8. Kawasan industri
9. Kawasan tempat wisata
10. Daerah yang padat Penduduk

(Petunjuk Teknis Kampung KB, 2015 : 8)

Selanjutnya untuk menentukan kriteria wilayah yang hendak dijadikan lokasi pembentukan Kampung KB dapat dipilih satu ataupun lebih dari sepuluh kriteria yang ada.

- c. Kriteria Khusus adalah kriteria yang mencakup lima hal, yaitu :
  1. kriteria data di mana setiap RT/RW mempunyai Data dan Peta Keluarga
  2. kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah masih tergolong rendah
  3. kriteria kebijakan KB di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari pencapaian rata-rata tingkat desa atau kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa ataupun kelurahan
  4. kriteria pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga untuk membina ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan Genre melalui Pusat Informasi Konseling Remaja masih sangat rendah
  5. kriteria pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya ada lima bidang yaitu kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan implementasi kebijakan lainnya sesuai dengan perkembangan. (Petunjuk Teknis Kampung KB, 2015 : 8-9)

#### **4. Sasaran Kegiatan Kampung KB**

Sasaran kegiatan merupakan subyek dan obyek pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB selain keluarga, Pasangan usia subur, lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang

memiliki lansia. Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan bidang tugas dan masing-masing yang pelaksananya adalah Kepala Desa atau Lurah, Ketua RT, Ketua RW, Pelaksana KB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan. Dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan para kader pembangunan lainnya. (Petunjuk Teknis Kampung KB, 2015 : 7)

Sejak pertamakali diluncurkan, kampung KB ditargetkan ada di setiap satu kecamatan yang berada di seluruh Indonesia. Artinya bahwa sepanjang tahun 2017 ini bakal ada sekitar 7166 Kampung KB yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Sampai pada Bulan April 2017. Kampung KB yang sudah terbentuk baru 633 dan sisanya masih ada sekitar sembilan bulan lagi untuk mengejar sekitar 6000 Kampung KB.

Kampung KB merupakan salah satu “senjata pamungkas” baru dari pemerintah untuk menangani permasalahan kependudukan. Terutama di beberapa wilayah yang mungkin jarang diperhatikan oleh pemerintah.

Kampung KB untuk kedepan akan menjadi ikon program kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung maupun yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera dan berkualitas.

Pada prinsipnya kebijakan KKBPK dapat mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera yaitu dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Pengimplementasian fungsi keluarga ini dapat membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Keberhasilan KKBPK dapat dilihat dari berbagai aspek.

Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusuri melalui berbagai indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Keluarga Berencana (KB) dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial dan budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan.

Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta Nawacita kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Kampung KB menjadi suatu kebijakan yang inovatif, yaitu kebijakan yang strategis dalam mengefektifkan program KKBPK secara paripurna di lapangan. Pasalnya, Kampung KB telah menjadikan model maupun miniatur pembangunan yang

melibatkan beberapa lintas sektor di masyarakat. Kampung KB adalah Satuan wilayah yang setingkat dengan RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan kebijakan KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Selain itu, manfaat dari adanya kebijakan Kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, Kampung KB juga dapat mampu mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Pada intinya program ini melibatkan semua lintas sektor pembangunan. Dengan kata lain Kampung KB ini tidak berbicara soal membatasi ledakan penduduk saja, akan tetapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan. Manfaat lain adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menjejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran perdagangan dari pihak seperti swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti halnya pelayanan Kampung KB, pelayanan pembuatan akta kelahiran atau kematian, pembangunan jalan dan jembatan, pembuatan ktp, penyediaan buku-buku bacaan, posyandu, PAUD dan lain lain. Meskipun begitu, tidak semua kampung dapat masuk program Kampung KB. Ada juga kriteria yaitu utama wilayah dan khusus. Dalam hal kriteria utama, sebuah kampung harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah keluarga kurang mampu diatas rata-rata tingkat desa dimana Kampung/RW tersebut berada. Bagi yang membentuk setara Desa, jumlah keluarga miskin di Desa tersebut harus diatas rata-rata Kecamatan dimana Desa itu berada. Selain itu, syarat utama lainnya adalah pencapaian KB di desa tersebut sangat rendah.

Dalam hal kriteria wilayah, setiap kampung KB harus memenuhi unsur seperti berada di wilayah yang kumuh, daerah pesisir yang bekerja sebagai nelayan, berada di Daerah Aliran Sungai (DAS), di daerah bantaran Kereta Api, Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotaan), Terpencil, Wilayah Perbatasan, Kawasan Industri, Kawasan Wisata, Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi.

Sedangkan dalam hal kriteria khusus, dibutuhkan intervensi dari lintas sektor. Kampung KB wajib mempunyai unsur antara lain pendidikan yang rendah dan infrastruktur yang kurang memadai. Maka dari itulah, untuk memenuhi kriteria tersebut, intervensi dari sektor lain sangat diperlukan.

Salah satu perwujudan kampung KB tepatnya adalah di Kecamatan Sooko. Berdasarkan penetapan dari BKKBN, Kecamatan Sooko terpilih dalam kategori yang tepat sebagai daerah yang menjadi contoh dalam pelaksanaan Kampung KB dikarenakan Kecamatan Sooko merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan yang didominasi oleh penduduk tidak sekolah, tidak tamat SD dan penduduk tamat SD. Selain itu, kecamatan Sooko yang terdiri dari 6 desa didominasi oleh penduduk yang belum tergabung dalam pelaksanaan program KB sehingga perlu adanya penerapan kampung KB untuk pengendalian kelahiran jumlah penduduk.

Karena desa-desa yang ada di Kecamatan Sooko merupakan desa dengan penduduk yang masih kolot dengan ciri mempertahankan adat. Bahkan telah lekat dalam kepercayaan masyarakat bahwa pepatah “banyak anak, banyak rejeki” membawa dampak terhadap pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tidak sebanding dengan kondisi perekonomian keluarga desa di Kecamatan Sooko. Penduduk di desa Kecamatan Sooko masih terdapat

banyak rumah tangga miskin sehingga perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah, salah satunya adalah pengembangan kampung KB.

Dalam pengelolaan maupun juga pelaksanaan kampung KB, harus dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait program yang ditawarkan oleh pemerintah. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan adanya sosialisasi terkait dengan kebijakan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan, Kampung KB harus dijalankan secara berkala sehingga kebijakan tersebut dapat berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena jika kebijakan Kampung KB tersebut berjalan dengan baik, secara otomatis akan mampu menekan pertumbuhan penduduk.

Pembentukan kampung KB Kecamatan Sooko, Desa Jurug secara langsung dilakukan oleh Bupati Mojokerto melalui SK Nomor : 188.45/405.21/2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berencana (Kampung Kb) Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Melalui SK tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo Membentuk Kelompok Kerja Kampung KB Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Adapun tugas yang diamanatkan kepada kelompok kerja tersebut yaitu:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk sektor terkait;
- b. menentukan target sasaran dan jadwal kegiatan ;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pembangunan di Wilayah Kampung KB Kabupaten Ponorogo;
- d. merencanakan evaluasi dan penilaian dari seluruh hasil usaha kegiatan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

Fungsi dari kelompok kerja Kampung KB tersebut adalah:

- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program KKBPK dan Program Pembangunan lainnya di Kampung KB;
- b. melaksanakan pemantauan kegiatan ;
- c. melaksanakan evaluasi hasil kegiatan ;
- d. mencatat dan menyiapkan bahan informasi kegiatan ;
- e. mengevaluasi seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan ;
- f. menyusun laporan kegiatan ;

Kampung KB Desa Jurug Kecamatan Sooko merupakan *Pilot Project* kampung KB tingkat Kabupaten Ponor. Berdasarkan SK tersebut, kemudian untuk SK Kampung KB di Kecamatan lainnya, cukup dikeluarkan SK dari Camat Masing-masing. Susunan kepengurusan Pokja Kampung KB, menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Kampung KB Desa Jurug, Kecamatan Sooko merupakan satu dari beberapa desa dan kecamatan yang ada di Mojokerto yang diamanati menjadi kampung KB. Sebelumnya, Desa Lengong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto diluncurkan sebagai kampung Keluarga Berencana (KB). Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BPPKBPP) Pemkab Mojokerto segera meluncurkan 18 desa lain menjadi kampung KB.

Kepala BPPKBPP Pemkab Mojokerto, Yudha Hadi mengatakan, ada 18 desa di 18 kecamatan menjadi kampung KB yang akan diluncurkan sebagai kampung KB. Ke-18

desa tersebut merupakan desa dengan tingkat partisipasi KB aktif terendah. Sebanyak 18 desa tersebut yakni:

- a. Desa Jembul di Kecamatan Jatirejo
- b. Desa Bening di Kecamatan Gondang
- c. Desa Nogosari di Kecamatan Pacet
- d. Desa Belik di Kecamatan Trawas
- e. Desa Tanjang Rono di Kecamatan Ngoro
- f. Desa Banjar Tanggul di Kecamatan Pungging
- g. Desa Wonodadi di Kecamatan Kutorejo
- h. Desa Leminggir di Kecamatan Mojosari
- i. Desa Sumberkarang di Kecamatan Dlanggu
- j. Desa Gayaman di Kecamatan Bangsal
- k. Desa Balongmojo di Kecamatan Puri
- l. Desa Pakis di Kecamatan Trowulan.
- m. Desa Mojoranu di Kecamatan Sooko
- n. Desa Gembongan di Kecamatan Gedeg
- o. Desa Mojokusumo di Kecamatan Kemlagi
- p. Desa Parengan di Kecamatan Jetis
- q. Desa Madurekso di Kecamatan Dawarblandong dan;
- r. Desa Kweden Kembar di Kecamatan Mojoanyar.

#### **5. Keikutsertaan Masyarakat pada Program Keluarga Berencana**

- a. Jumlah Pasangan Usia Subur Kelompok Umur Wanita

Adapun jumlah pasangan usia subur pada kelompok umur wanita yaitu ditunjukkan tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 1.6

Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) Kelompok Usia Wanita

No	Kelompok Umur	Jumlah PUS	PUS Peserta KB	PUS Bukan Peserta KB
1	<15 tahun	-	-	-
2	15-19 tahun	34	29	5
3	20-24 tahun	162	128	34
4	25-29 tahun	192	160	32
5	30-34 tahun	247	138	109
6	35-39 tahun	312	158	154
7	40-44 tahun	156	101	55
8	45-49 tahun	112	74	38
9	50-65 tahun	-	-	-
10	>39 tahun	-	-	-
Jumlah		1215	788	427

Sumber: Inventarisasi Data Kampung KB, 2016-2018.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 posisi jumlah PUS pada kelompok usia wanita berbeda-beda. Adapun jumlah PUS yaitu sebesar 1215 jiwa, PUS peserta KB berjumlah 788 jiwa, dan PUS bukan peserta KB yaitu berjumlah sebesar 427 jiwa.

#### Keikutsertaan ber-KB per Mix Kontrasepsi

Berikut ini data tentang keikutsertaan ber-KB per Mix-kontrasepsi pada masyarakat desa Jurug

Tabel 1.7

## Keikutsertaan peserta KB per Mix Kontrasepsi

No	Kontrasepsi	Jumlah PUS
1	IUD	119
2	MOW	102
3	MOP	46
4	Implan	171
5	Suntik	315
6	Pil	26
7	Kondom	9
Jumlah		788

Sumber: Inventarisasi data Kampung KB, 2016-2018

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 keikutsertaan ber-KB per Mix kotrasapse yaitu IUD sebesar 119 jiwa, kontrasepsi MOW sebesar 102 jiwa, kontrasepsi MOP sebesar 46 jiwa, kontrasepsi implant sebesar 171 jiwa, kontrasepsi suntik sebesar 315 jiwa, kontrasepsi pil sebesar 26 jiwa, dan kontrasepsi kondom sebesar 9 jiwa. Jumlah total keikutsertaan ber-KB per Mix kontrasepsi yaitu sebanyak 788 jiwa. (Inventarisasi Data Kampung KB, 2016-2018)

PUS bukan Peserta KB:

Adapun PUS bukan peserta KB yang ada di desa Jurug adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8

## Pasangan UsiaSubur, Bukan Peserta KB

No	Uraian	Jumlah PUS	% terhadap PUS
----	--------	------------	----------------

1	Hamil	49	11,47%
2	Ingin Anak Segera	207	48,48%
3	Ingin Anak Ditunda	81	18,97%
4	Tidak Ingin Anak Lagi	90	21,07%
Jumlah		427	54,19%

Sumber: Inventarisasi Data Kampung KB, 2016-2018.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah PUS bukan peserta KB yaitu hamil sebesar 49 peserta atau 11,47%, ingin anak segera sebanyak 207 peserta atau 48,48%, ingin anak ditunda sebanyak 81 peserta atau 18,97%, tidak ingin anak lagi sebanyak 90 peserta atau 21,07%. Jumlah total PUS bukan peserta KB yaitu sebanyak 427 peserta atau 54,19% (Dokumen Pemerintah Desa Jurug, diambil 2018: 03)

#### 4) Data Keluarga Berencana (Mei 2018)

Adapun jumlah PUS kelompok wanita per bulan Mei 2018 yaitu ditunjukkan pada data berikut ini:

Tabel 1.9

#### Jumlah Pasangan Usia Subur Kelompok Umur Wanita

No	Kelompok Umur	Jumlah PUS	PUS Peserta KB	PUS Bukan Peserta KB
1	<15 tahun	-	-	-
2	15-19 tahun	36	34	2
3	20-24 tahun	162	148	14
4	25-29 tahun	192	177	15

5	30-34 tahun	247	138	109
6	35-39 tahun	312	158	154
7	40-44 tahun	156	101	55
8	45-49 tahun	112	74	38
9	50-65 tahun	-	-	-
10	>39 tahun	-	-	-
Jumlah		1217	830	387

Sumber: Inventarisasi Data Kampung KB, 2016-2018.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 posisi jumlah PUS pada kelompok usia wanita berbeda-beda. Adapun jumlah PUS yaitu sebesar 1217 jiwa, PUS peserta KB berjumlah 830 jiwa, dan PUS bukan peserta KB yaitu berjumlah sebesar 387 jiwa. (Inventarisasi data kampung KB : 2016-2018 : 08)

#### 5) Keikutsertaan ber-KB per Mix Kontrasepsi

Adapun keikutsertaan masyarakat dalam ber-KB mix kontrasepsi pada masyarakat desa Jurug adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7

Keikutsertaan ber-KB per Mix Kontrasepsi

No	Kontrasepsi	Jumlah PUS
1	IUD	112
2	MOW	96
3	MOP	46
4	Implan	203
5	Suntik	336

6	Pil	27
7	Kondom	10
Jumlah		830

Sumber: Inventarisasi Data Kampung KB, 2016-2018.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 keikutsertaan ber-KB per Mix kotrasapse yaitu IUD sebesar 112 jiwa, kontrasepsi MOW sebesar 92 jiwa, kontrasepsi MOP sebesar 46 jiwa, kontrasepsi implant sebesar 203 jiwa, kontrasepsi suntik sebesar 336 jiwa, kontrasepsi pil sebesar 27 jiwa, dan kontrasepsi kondom sebesar 10 jiwa. Jumlah total keikutsertaan ber-KB per Mix kontrasepsi yaitu sebanyak 830 jiwa.